

ISBN : 978-602-73773-0-1

PROSIDING

Seminar Nasional Sendratasik (SEMNASSEND)-1



TEATER TERTUTUP
FBS UNP
SABTU, 14 NOPEMBER 2015

**SEMNAS
SEN 75**

JURUSAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Editor:

Sumaryadi; Universitas Negeri Yogyakarta

Ediwar; Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Indrayuda; Universitas Negeri Padang

Yos Sudarman; Universitas Negeri Padang

Syeiledra; Universitas Negeri Padang

Affah Asriati; Universitas Negeri Padang

PROSIDING

**SEMINAR NASIONAL SENDRATASIK
(SEMNASSEND)-1 TAHUN 2015**

**PEMBERDAYAAN PERAN PENDIDIKAN SENI DAN BUDAYA
MENUJU KESETARAAN KUALIFIKASI *OUTCOME*
PENDIDIK YANG PROFESIONAL**

Prosiding
SEMINAR NASIONAL SENDRATASIK
(SEMNASSEND)-1 TAHUN 2015

**PEMBERDAYAAN PERAN PENDIDIKAN SENI DAN BUDAYA
MENUJU KESETARAAN KUALIFIKASI *OUTCOME*
PENDIDIK YANG PROFESIONAL**

Editor:

Sumaryadi	Universitas Negeri Yogyakarta
Ediwar	Isntitut Seni Indonesia Padangpanjang
Indrayuda	Universitas Negeri Padang
Yos Sudarman	Universitas Negeri Padang
Darmawati	Universitas Negeri Padang
Syeilendra	Universitas Negeri Padang
Ardipal	Universitas Negeri Padang
Afifah Asriati	Universitas Negeri Padang
Jagar Lumbantoruan	Universitas Negeri Padang
Fuji Astuti	Universitas Negeri Padang
Desfiarni	Universitas Negeri Padang

Sabtu, 14 November 2015
di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat - Indonesia

JURUSAN SENDRATASIK
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015

Prosiding
SEMINAR NASIONAL SENDRATASIK
(SEMNASSEND)-1 TAHUN 2015

**PEMBERDAYAAN PERAN PENDIDIKAN SENI DAN BUDAYA
MENUJU KESETARAAN KUALIFIKASI *OUTCOME*
PENDIDIK YANG PROFESIONAL**

© SENDRATASIK FBS UNP 2015

Editor : Dr. Sumaryadi, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
: Ediwar, S.Sn., M.Hum, Ph.D. (Isntitut Seni Indonesia Padangpanjang)
: Indrayuda, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (Universitas Negeri Padang)
: Yos Sudarman, S.Pd., M.Pd. (Universitas Negeri Padang)
: Dra. Darmawati, M.Hum., Ph.D. (Universitas Negeri Padang)
: Syeilendra, S.Kar., M.Hum. (Universitas Negeri Padang)
: Dr. Ardipal, M.Pd. (Universitas Negeri Padang)
: Afifah Asriati, S.Sn., M.A. (Universitas Negeri Padang)
: Drs. Jagar Lumbantoruan, M.Hum. (Universitas Negeri Padang)
: Dra. Fuji Astuti, M.Hum. (Universitas Negeri Padang)
: Dra. Desfiarni, M.Hum. (Universitas Negeri Padang)

Desain Sampul : Harisnal Hadi
: Irdhan Epria Darma Putra

Layout: : Yos Sudarman

Cetakan Pertama : 2015

Penerbit : SENDRATASIK FBS UNP
Jalan Prof. Dr. HAMKA Air Tawar, Padang
Sumatera Barat 25131, Indonesia
Telp. (0751) 7053363
<http://sendratasik.fbs.unp.ac.id>
e-mail: sudarmansendra@fbs.unp.ac.id

Percetakan : SUKABINA
Jl. Prof. Dr. Hamka No. 29 Tabing Padang
Telp. (0751) 7055660

ISBN :

Hak Cipta © 2015: pada Penulis dan Penerbit
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian, ataupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, sekaligus salawat beriring salam kepada Rasullullah saw, yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua.

Sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang sekaligus juga memberi kesempatan kepada sivitas akademika Jurusan Sendratasik dan alumni, beserta para peneliti, pengajar, dan mahasiswa untuk dapat bertukar pikiran, pandangan, dan opini secara ilmiah dan bernuansa akademik, maka Jurusan Sendratasik perlu menyelenggarakan seminar nasional bidang seni budaya dan pembelajarannya. Pada tahun ini, kegiatan dimaksud diberi nama Seminar Nasional Sendratasik (SEMNASSEND)-I Tahun 2015 dengan tema “Pemberdayaan Peran Pendidikan Seni dan Budaya menuju Kesetaraan Kualifikasi *Outcome* Pendidik yang Profesional”.

Pelaksanaan seminar nasional ini juga merupakan respon terhadap saran pimpinan universitas dan fakultas, agar kiranya jurusan maupun program studi se-lingkungan Universitas Negeri Padang dapat senantiasa menyemarakkan kegiatan ilmiah yang bermuara pada penelitian, penulisan artikel ilmiah, baik yang terpublikasi secara langsung dalam orasi ilmiah tingkat nasional, regional, dan internasional, maupun yang terpublikasi secara *on-line*.

Di samping itu, kegiatan seminar ini telah ditanggapi secara positif oleh para alumni, dosen, dan guru-guru Seni Budaya khususnya, karena kegiatan ini telah ikut memberi peluang bagi banyak pihak untuk bisa berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan *outcome* pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan setingkat sekolah dan perguruan tinggi seni, baik pada jalur LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) maupun non-LPTK lainnya. Oleh sebab itu, pada saat berbagai artikel ilmiah dalam seminar ini telah dipresentasikan sedemikian rupa, ada tanggung jawab desiminasi karya ilmiah oleh Panitia dalam bentuk cetak prosiding maupun diunggah di situs resmi institusi di mana seminar ini dilaksanakan.

Terima kasih sekali lagi disampaikan kepada para pemakalah yang telah berkontribusi dalam seminar nasional ini, sehingga berbagai pemikiran positif dan inovatif tentang seni budaya dan pembelajarannya bisa memberikan pencerahan baru terhadap pengembangan wawasan, apresiasi, kritik, dan solusi terhadap semua usaha untuk peningkatan peran pendidikan seni dan budaya dalam memperbaiki kualitas pembelajarannya demi menemukan kesetaraan kualifikasi lulusan atau *outcome* tenaga pendidik yang profesional di sekolah dan perguruan tinggi.

Secara khusus, saya atas nama lembaga juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah bekerja sesuai satuan tugas yang telah dipercayakan, semoga kerjasama dan ketulusan hati dalam menyukseskan kegiatan seminar ini mendapat imbalan setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Besar harapan kita semua, jika pada tahun-tahun mendatang, kegiatan ilmiah serupa ini bisa dilaksanakan kembali dengan tema yang lain dengan kualitas penyelenggaraan yang lebih ditingkatkan tentunya, Amin.

Akhir kata, terima kasih atas segala dukungan moril maupun materil dalam penyelenggaraan seminar ini. Tentu ‘*tak ada gading yang tak retak*’, dan mohon kiranya semua kekurangan yang ada bisa dimaafkan. *Wassalam.*

Padang, 14 November 2015
Ketua Jurusan Sendratasik
FBS UNP
Syeilendra, S.Kar., M.Hum.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
1. Sumaryadi <i>Universitas Negeri Yogyakarta</i> Jurusan Pendidikan Seni di LPTK Berbasis KKNI dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Seni Budaya di Sekolah Berbasis Kurikulum 2013	1
2. Ediwar <i>Institut Seni Indonesia, Padangpanjang, Sumatera Barat</i> Peranan Perguruan Tinggi Seni dalam Mempersiapkan Lulusan Menuju Dunia Kerja	9
3. Indrayuda <i>Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat</i> Problematika Lulusan Sendratasik; antara Kebijakan, Kompetensi, dan Profil Kurikulum yang Tersedia	19
4. Afifah Asriati <i>Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat</i> Entitas Tari dan Penari Minangkabau berdasarkan Nilai <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i>	26
5. Ardipal <i>Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat</i> Keterandalan Kurikulum di Program Studi Sendratasik Mengantisipasi Perubahan Kurikulum dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Seni di Sekolah	36
6. Arita <i>Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat</i> Kreatifitas dan Apresiasi Seni Tari di Madrasah	45
7. Asmaneli <i>SMA Negeri 1 Lubuk Basuang, Sumatera Barat</i> Strategi Guru dalam Pengembangan Kreatifitas Siswa dalam Pembelajaran Seni Budaya di Sekolah	49
8. Darmawati <i>Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat</i> Pembentukan Karakter Minangkabau Mahasiswa Sendratasik melalui Nilai Kearifan Lokal pada <i>Tari Galombang</i>	54

9. Desfiarni <i>Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat</i> Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Gerak Tari Piriang.....	62
10. Desniwati <i>SMP Negeri 2 Palupuah Agam, Sumatera Barat</i> Pengukuran Hasil Belajar Siswa menurut Kurikulum di SMP Negeri 2 Palupuah Agam	69
11. Elen Triana <i>SMP Negeri 1 Solok, Sumatera Barat</i> Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter melalui Kurikulum 2013	74
12. Ermawati <i>SMK Negeri 1 Bukittinggi, Sumatera Barat</i> Model Pembelajaran Kooperatif Tutor Sebaya untuk Memotivasi Belajar Siswa dalam Pelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 1 Koto Baru Darma Raya	79
13. Ervinorita (SMK Negeri 1 Bukittinggi, Sumatera Barat) “Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Pembelajaran Seni Budaya di SMK Negeri 1 Bukittinggi”	83
14. Esy Maestro (Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat) “Wacana Pengembangan Pendidikan Karakter melalui Kajian Musik Perilaku dan Perilaku Musik”	88
15. Fuji Astuti (Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat) “Pengukuran Hasil Belajar Siswa enurut Kurikulum di SMP Negeri 2 Palupuah Agam”	97
16. Harisnal Hadi (Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat) “Pembelajaran Seni Budaya di Kelas X di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang”	103
17. Hernis (SMP Negeri 1 Sungai Pua, Agam, Sumatera Barat) “Kegiatan Apresiasi sebagai Sarana Mengetahui dan Memahami serta Menghargai Seni Tari bagi Siswa di SMP Negeri 3 Sungai Pua Agam”.....	110
18. Jagar Lumbantoruan (Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat) “Menciptakan Pembelajaran Efektif Seni Budaya (Musik) melalui Model Pembelajaran”	114
19. Leni Efendi dan Hasnah Sy	

(Institut Seni Indonesia, Padangpanjang, Sumatera Barat)	
“Kesenian tradisional <i>Tupai Jenjang</i> pada Masyarakat Siulak Kerinci Sebagai Teater Tuter Ditinjau dari Struktur Penyajiannya”	121
20. Netti Wirza	
(SMP Negeri 1 Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat)	
“Membangun Motivasi Siswa terhadap Pembelajaran Seni Budaya di SMP Negeri I Ampek Angkek Agam”	131
21. Nurneli	
(SMP Negeri 1 Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat)	
“Dampak Metode Resitasi terhadap Hasil Belajar Seni Budaya Terhadap Siswa SMP Negeri 1 Lubuak Basuang”	135
22. Sefmiwati	
(SMP Negeri 7 Kubung, Darmasraya, Sumatera Barat)	
“Mendorong Pendidikan Karakter Kebangsaan dengan Pembelajaran Seni Budaya”	138
23. Selmi Eliza	
(SMK Negeri 1 Bukittinggi, Sumatera Barat)	
“Motivasi Siswa dalam Pembelajaran Tari Daerah Setempat di SMK Negeri I Bukittinggi”	144
24. Susmiarti	
(SMK Negeri 1 Bukittinggi, Sumatera Barat)	
“Tinjauan Koreografis <i>Tari Mulo Pado</i> Kreasi di SMK Negeri 7 Padang”	149
25. Syeilendra	
(Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat)	
“Desain Kurikulum Berbasis Budaya”	154
26. Tulus Handra Kadir	
(Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat)	
“Intermusikalitas: Sinergi Etnomusikologi dan Pendidikan Musik tentang Musikalitas dalam Konteks Pendidikan Musik Interkultural”	158
27. Yeni Marita	
(SMK Negeri 1 Bukittinggi, Sumatera Barat)	
“Meningkatkan Kreativitas Siswa dengan Metode Apresiatif dalam Pembelajaran Seni Musik”	168
28. Yos Sudarman	
(Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat)	
“Merekonstruksi Cara Pandang Guru Terhadap Hakikat Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013”	172
29. Yulinofendri	
(SMA Negeri 8 Bukittinggi, Sumatera Barat)	

“Jenis dan Fungsi Seni Tari dalam Pembelajaran Seni Budaya di Sekolah”	179
30. Yuhelmi (SMP Negeri 13 Padang, Sumatera Barat) “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Group Investigation</i> dalam Pembelajaran Seni Tari di SMP Negeri 13 Padang”	184
31. Yusmawati (SMP Negeri 38 Sijunjung, Sumatera Barat) “Penerapan Penilaian Autentik dalam Mata Pelajaran Seni Budaya”	189
32. Yusnayerti (SMP Negeri X, Sumatera Barat) “Pembelajaran Seni Budaya Berbasis Kurikulum 2013 di SMP Muhammadiyah Lubuk Basung”	197
33. Yusnidar (SMP Negeri I Sintuak Toboh Gadang, Padang Pariaman, Sumatera Barat) “Metode Eksploratif sebagai Rangsangan Imajinasi Siswa dalam Pembelajaran Seni Kria”	204

Yos Sudarman : **MEREKONSTRUKSI CARA PANDANG GURU
TERHADAP HAKIKAT PENDIDIKAN KARAKTER
DALAM KURIKULUM KURIKULUM 2013**
Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat
sudarmanmisterjejet@gmail.com

Abstrak : Sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan dalam arti pendidik, pengajar, dan pelatih, guru-guru di sekolah menengah (SMPA/SMA) khususnya, saat ini sedang dihadapkan pada bagaimana merubah cara pandang terhadap kurikulum dan pembelajarannya, khususnya untuk menyesuaikan diri dalam menetapkan tujuan dan cara belajar dari kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013. Pengalaman mengajar di ruang kelas selama ini yang lebih berorientasi kepada pengetahuan dan keterampilan, secara perlahan namun pasti, mesti diubah ke materi dan kegiatan pembelajaran yang mengedepankan pendidikan sikap (afektif), atau yang disebut juga dengan pendidikan karakter. Mementingkan pendidikan sikap dalam pendidikan dalam pembelajaran di kurikulum 2013 bukan berarti mengurangi kebermaknaan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran tersebut. Sesungguhnya hakekat substansi pendidikan sebagai pembelajaran bersifat humaniora, yang mendidik siswa memiliki nilai kemanusiaan untuk kehalusan sikap dan budi pekerti. Dengan kata lain, mengedepankan materi dan kegiatan pembelajaran yang dalam arti mendidik pada basis pendidikan karakter, di samping mengajarkan pengetahuan dan melatih keterampilan dalam belajar, sudah menjadi intisari dari pembelajaran di Kurikulum 2013 yang mesti ditindaklanjuti oleh guru dengan pembelajaran sederhana, terintegrasi, dan bermakna.

Kata Kunci : Pendidikan Karakter; Kurikulum 2013; Pembelajaran Bermakna

A. PENDAHULUAN

Meskipun asumsi empat dekade para kritisi pendidikan di Indonesia hampir terbukti, bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia tidak ubahnya seperti *weak roots and shoots weathered* atau “*lemah di akar, lapuk di pucuk*” alias tidak pernah siap/selesai dipakai, perlunya mengedepankan sikap optimis para pemerhati pendidikan dan guru harus senantiasa dikibarkan, seiring dengan pemberlakuan definitif kurikulum 2013. Tak pelak lagi, jika ada dua kesan menonjol yang mungkin bisa dilihat dari roman dan tingkahlaku yang ditunjukkan sebagian guru, saat kedatangannya di hari pertama ke sekolah pada awal semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 tanggal 15 Juni 2014, yaitu: Pertama, gamang atau kecut dengan pelaksanaan kurikulum 2013; dan kedua, *masa bodoh* dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Akan munculnya fenomena demikian bukan tanpa alasan, sebagaimana yang pemakalah kutip dari pendapat yang dimuat di <http://danizmi.blogspot.com> bahwa pemberlakuan Kurikulum 2013 sesungguhnya telah mengusik kapabilitas seorang guru secara substansial. Sebab dengan Kurikulum 2013, hanya akan menempatkan guru pada posisi sebagai robot-robot mekanik yang menjalankan program pemerintah, sebagaimana diungkapkan Prof Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd, guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Dengan adanya posisi robot seperti itu, guru nantinya akan mengalami degradasi semangat dan motivasi kerja bidang keguruannya. Semestinya dengan terjadinya perubahan kurikulum saat ini, guru seyogyanya diposisikan sebagai pembelajar. Sedangkan perubahan kurikulum sebagai kegiatan pembelajaran bagi para guru. Menempatkan guru pada posisi ideal seperti ini penting, karena guru akan mampu mengoptimalkan kegiatan pembelajaran manakala ada keterlibatan dalam pengembangan tujuan dan perencanaan pembelajaran. Namun dengan adanya Kurikulum 2013, guru tidak ditempatkan lagi sebagai variable penentu. Guru berada pada posisi kurang dipercaya dan dipandang kurang berdaya. Dengan pengembangan Kurikulum 2013 yang terkesan sentralistik, menyebabkan nantinya penafsiran terhadap Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), bahkan silabus dan buku, juga tidak memancing minat guru untuk berkreatifitas dalam pengelolaan pembelajaran, karena semuanya telah

dipersepsikan secara terpusat. Meskipun demikian, menurut Prof. Sarwiji, dengan berkurangnya peran guru dalam Kurikulum 2013, dapat menjadi berita baik dan ‘menyenangkan’ bagi sebagian guru. Namun bagi sebagian guru yang lain bisa dipandang sebagai berita buruk, karena guru merasa kurang dihargai dan perannya sebagai ujung tombak keberhasilan pembelajaran di kelas dengan menerapkan Kurikulum 2013 yang serba mengatur.

Selanjutnya pernah penulis bertanya kepada dua-tiga orang guru SD-SMP di Kota Padang, “Bagaimana kesiapan Ibu/Bapak menghadapi Kurikulum 2013?”; sontak di antara mereka menjawab, “*di ma ka tibo se lah*”. Maksudnya “bagaimana jadinya nanti”, atau minimal tergantung penyesuaian yang bisa dilakukan sambil jalan. Meskipun pertanyaan ini tidak *legitimate* untuk disetarakan dengan *polling* kurikulum 2013, namun jawaban yang diberikan guru seperti itu, setidaknya senada dengan beberapa jawaban hasil survei pengamat pendidikan independen pada beberapa lembaga swadaya perseorangan /masyarakat bahwa, di antara guru di Indonesia (apalagi di pelosok), cenderung memilih *status-quo* terhadap kurikulum 2013.

B. EVALUASI DAN REFLEKSI PENGGANTIAN KURIKULUM

Lahirnya sebagian sikap guru *tidak ambil pusing* sedemikian, menurut analisa penulis, bukan karena substansi Kurikulum 2013 yang tidak *qualified*. Sekali lagi!; bukan karena materi Kurikulum 2013 yang tidak bermutu. Namun lebih disebabkan oleh sistem kurikulum evaluasi dan refleksi kurikulum 2013 yang bekerja selama masa pengembangan dalam transisi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) ke Kurikulum 2013 berlangsung dengan “sangat-amat cepat”. Walaupun pada masa pengembangan dan transisi kurikulum dimaksud, Kemendikbud telah menjalankan empat tahap yaitu: Pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud, yang melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan; Kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan pada tanggal 13 November 2012 dan di depan Komisi X DPR RI tanggal 22 November 2012; Ketiga, pelaksanaan uji publik untuk mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, misalnya dengan saluran *on-line* pada laman <http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id>, termasuk dengan media massa masa; Keempat, melakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kurikulum 2013; tetap saja waktu yang diberikan tidak cukup bagi masyarakat untuk dapat memberikan umpan balik terhadap proses evaluasi dan refleksi yang melatarbelakangi lahirnya kurikulum 2013.

Dari keempat tahapan pengembangan kurikulum 2013 di atas, penulis melihat dua keganjilan, yaitu: Pertama, “Kenapa pada tahapan penyusunan kurikulum di tingkat pakar, pemerintah hanya melakukannya secara internal, terkesan dipaksakan, lebih tertutup, dan tidak melibatkan masyarakat? Dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam tahap penyusunan kurikulum, banyak pelaksana pendidikan di sekolah tidak mengerti, atas alasan apa kurikulum KTSP harus diganti. Kedua, “Apakah dengan empat tahapan masa pengembangan kurikulum 2013 yang ditetapkan itu, sudah cukup cara dan kesempatan untuk mendapatkan pertimbangan yang akurat tentang penggantian KTSP menjadi Kurikulum 2013?”. Jawabnya, tentu tidak. Anggap saja KTSP yang baru diterapkan enam tahun (2006-2012), tidaklah ideal digugurkan oleh evaluasi dan refleksi secepat antara satu sampai dua tahun. Dulu, ketika KTSP 2006 muncul untuk menggantikan KBK 2004, digadang-gadangkan jika KTSP adalah bentuk penyempurnaan KBK. Lalu sekarang, “Apakah dengan munculnya Kurikulum 2013, juga dikatakan sebagai penyempurnaan KTSP?” Akhirnya, mana kurikulum yang menyempurnakan, dan mana kurikulum yang disempurnakan, semuanya menjadi kabur. Maka tidak salah kata guru-guru yang bertugas di Jawa mengatakan, “*Kok ora ngenteni sepuluh taun sadurunge, kurikulum saiki bisa diganti?*” Artinya, kenapa tidak ditunggu sepuluh tahun dulu, kurikulum sekarang bisa diganti? Guru yang lain menyela, “*Eyalah mas mas, aken piyambak sepuluh taun, anyar rong taun KBK wis diganti KTSP*. Artinya, “Jangankan sepuluh tahun, KBK baru dua tahun sudah diganti KTSP”.

C. PENGGANTIAN KURIKULUM, KEPUTUSAN

BERDAMPAK JANGKA PANJANG

Dari penjelasan tentang masa pengembangan dan transisi kurikulum di atas, ijinkan Penulis ikut mengekspresikan kegundahan yang masih “belum kesiangkan”, yakni mempertanyakan “Pertanda apa ini, dengan pemberlakuan Kurikulum 2013?” Artinya, para pendidik tentu tidak perlu berlagak pikun, atau tidak mau tahu. Sesungguhnya hal itu terjadi sebagai gejala akut ketidakmapanaan pembangunan konsep kurikulum dalam pendidikan di Indonesia. Mengaitkan hal ini kembali ke masalah Kurikulum 2013, wajar sebagian masyarakat menganggap jika hasil survei terhadap Kurikulum 2013, khususnya yang dipublikasikan pemerintah, terkesan *artificial*. Andaikata keputusan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 ini, nyatanya nanti membawa dampak *re-obscuring* (mengaburkan kembali) arah, sasaran dan tujuan pendidikan di Indonesia, maka keputusan itu adalah keputusan yang keliru sebagaimana kekeliruan yang sama pernah terjadi dalam orde-orde pemerintahan sebelumnya.

Tidak satu atau dua lagi keputusan pemerintah di bidang pendidikan yang dianggap keliru. Contohnya, kalau sekarang pemerintah berani mengatakan bahwa Kurikulum 2013 berorientasi KBK, lalu apanya yang salah dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 2004? Yang lebih membingungkan adalah adanya *statement* pejabat kementerian Dikbud yang menyatakan “*Kurikulum 2013 merupakan realisasi KBK 2004 yang dulu pernah tertunda*”. pertanyaannya, “Kenapa KBK 2004 dulu harus ditunda?” “Apakah ada yang salah dengan KBK 2004?” Atau jangan-jangan, “Ada kepentingan politik *udang di balik batu* yang turut menyandera kepentingan pendidikan saat itu?”

Ikhwal keputusan bidang pendidikan lainnya, yang pada awalnya menurut penulis adalah sesuatu keputusan pemerintah yang sudah jelas dan mengikat, justru dikaburkan lagi dengan keputusan pemerintah periode berikutnya, juga terjadi di perguruan tinggi. Contohnya, bilamana kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yang bercirikan KBK sudah diatur dengan jelas dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/u/2002 bahwa Kurikulum Inti Perguruan Tinggi adalah KBK, dan sepuluh tahun kemudian dipekuat dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang juga mengisyaratkan KBK dengan otonomi perguruan tinggi, lalu apa urgensinya dikeluarkan lagi Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang kurikulum KKNI (Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia)? Katanya, agar dengan KKNI, perguruan tinggi dapat menjalankan KBK untuk mencapai kesetaraan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berdaya saing tinggi. Kalau memang demikian, berarti pendidikan yang ada di perguruan tinggi selama ini tidak *competible* membentuk lulusan yang kompeten di bidangnya? Jika memang begitu, kita semua perlu menginstropeksi diri kembali dengan meninjau pasal 1 ayat 1 dan 2 Kepmendiknas Nomor 045/u/2002 bahwa; Pasal 1: “Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.” Ayat 1: “Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: (a) kompetensi utama; (b) kompetensi pendukung; (c) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.” Nah, kalau esensi dari bunyi Pasal 1 dan 2 Kepmendiknas Nomor 045/u/2002 itu sudah mengisyaratkan KBK, lalu ide KBK yang mana lagi yang hendak dicapai dalam KKNI?

Berpangkal tolak pada landasan operasional pelaksanaan KBK di perguruan tinggi berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/u/2012 di atas, mungkinkah pelaksanaan KBK selama ini tidak semestinya, sehingga selama 12 tahun KBK di perguruan tinggi belum mampu mencetak sarjana dan tenaga profesional yang ahli dan terampil? Mungkinkah selama 12 tahun berlakunya KBK di perguruan tinggi, dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan untuk mendapat pengakuan internasional (*recognition of the International responsibility*) terhadap kesetaraan SDM yang mampu mendorong peningkatan daya saing nasional? Maaf, kalaulah di antara kita ada yang memiliki pemikiran seperti ini, boleh jadi asumsi pendidikan di perguruan tinggi yang tidak punya sasaran dan tujuan yang jelas selama 12 tahun itu (sama seperti kaburnya pendidikan di sekolah), nyata adanya. Maka benarlah hipotesis bahwa Indonesia akan tetap kesulitan untuk bisa tinggal landas dari negara berkembang ke negara maju, karena keputusan-keputusan vital dan strategis yang diambil pemerintah untuk bidang pendidikan cenderung tergesa-gesa, tidak konseptual, tidak memiliki arah, sasaran, dan tujuan yang jelas.

D. GURU YANG BIJAKSANA, KEMBALI KE KELAS

Sejak awal tahun pelajaran 2013/2014 Kemendikbud telah meninstruksi 6.325 sekolah di 295 kabupaten/kota di 33 provinsi, yang terdiri dari jenjang SD (2.598 sekolah), SMP (1.436 sekolah), SMA (1.270 sekolah) serta SMK (1.021 sekolah), atau sekitar 68% jumlah sekolah di seluruh Indonesia sudah harus melaksanakan Kurikulum 2013, minimal di kelas I dan kelas IV (SD), kelas VII (SMP), serta kelas X (SMA/SMK). Setahun kemudian, yaitu di awal tahun ajaran baru 2014/2015, akhirnya pemerintah “ketok palu”, bahwa kurikulum 2013 sudah mesti dilaksanakan di semua tingkatan kelas (I s.d. XII) dan pada semua jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, dan SMA) pada seluruh sekolah di Indonesia. Fantastis!

Menyikapi keputusan pemerintah yang sudah definitif itu, “Apakah guru-guru di SMP/SMA masih ingin bolak-balik untuk mempertanyakan kurikulum 2013?” Atau, “Apakah lebih baik guru pendidikan seni itu menerima keputusan itu, karena pemberlakuan Kurikulum 2013 dengan segala payung hukumnya sudah menjadi keputusan final pemerintah?” Dalam hal ini, penulis punya pertimbangan, jika sudah waktunya pula guru-guru menerima pemberlakuan Kurikulum 2013, apapun konsekuensinya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, guru mesti tetap mengedepankan rasionalitas dan tidak perlu amat reaksional terhadap Kurikulum 2013. Kita tidak ingin, jika sebagian besar waktu kita terus tergerus hanya untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak lagi substansial tentang kurikulum 2013 seiring dengan bergulirnya waktu menyelenggarakan pendidikan untuk generasi yang kualitas yang terbaharukan.

Setuumpuk masalah pendidikan dan pembelajarannya di sekolah sebagai sebuah bidang studi/mata pelajaran sudah hadir di depan mata, dan semua itu butuh penanganan segera dan berkelanjutan. Meskipun rumpun ilmu setiap mata pelajaran bisa diklasifikasikan berbeda, namun dengan pemberlakuan kurikulum 2013, sebagian besar persoalan yang dihadapi guru (khususnya di tingkat pendidikan SMP dan SMA) dengan persoalan pada mata pelajaran lain adalah sama, yaitu bagaimana memuarakan pembelajaran bidang studi sesuai dengan kurikulum 2013 yang berbasis karakter.

Sebagai sosok yang dijuluki *educational spearhead* (ujung tombak pendidikan), guru mesti kembali ke *track*-nya semula, yaitu kembali ke kelas sebagai pendidik yang mengabdikan kepada kepentingan pendidikan dalam konteks mendidik (*affective oriented*), mengajar (*cognitif oriented*), dan melatih (*psikomotor oriented*) baik dalam lingkup intra, ekstra, maupun ko-kurikuler. Kurang ideal rasanya guru (termasuk dosen) melibatkan diri berlama-lama seraya bertingkah pola bagai seorang pengamat di belakang meja. Namun akan lebih mulia jika ia konsisten dengan komitmennya untuk melanjutkan nafas pendidikan demi bergeraknya kembali sistem pembelajaran di ruang-ruang kelas dan ruang kuliah. Ikhtiar mencerdaskan generasi penerus negeri yang kontan ada di tangan Bapak dan Ibu guru, tidak boleh terhenti hanya karena adanya *riak-riak* gonta-ganti kurikulum yang sebenarnya menjadi ramai oleh pandangan-pandangan spekulatif kurikulum yang menawarkan perdebatan instan yang lebih melahirkan pro-kontra *political effect* para pakar, kritikus, dan media, ketimbang memperdebatkan substansinya. Jadi pergantian kurikulum di Indonesia disinyalir bukan seluruhnya sebagai suatu kebutuhan mendesak suatu generasi, melainkan lebih karena latarbelakang intrik politik dan suksesi kekuasaan. Oleh karena itu, guru mesti tetap bisa membedakan nilai untung-rugi memperjuangkan pendidikan atas kepentingan kependidikan, dan bukan ikut-ikutan memperjuangkan pendidikan untuk politik kepentingan “lain” yang bisa mencederai pendidikan. Memang benar jika urgensi pergantian kurikulum dapat merevitalisasi visi dan misi pendidikan ke depan, namun yang jauh lebih penting dilakoni guru dan sekolah adalah, bahwa kita semua selaku pendidik perlu menjaga dan mempertahankan stabilisasi kurikulum yang menjamin kesinambungan dinamika pendidikan hari ini, hari esok, dan hari mendatang.

E. KURIKULUM 2013, MEREREPOSISI TUJUAN BELAJAR

“BLOOM MAINDED”

Tidak disangkal lagi, jika dunia luar melihat geliat pendidikan Indonesia dalam tiga dekade terakhir sebagai salah satu negara di dunia dengan populasi pendidikan terbesar, dan konsep pendidikannya juga menganut paham “*Bloom Mained*”. Paling tidak sejak diterapkan Kurikulum 1975 yang Disempurnakan pada tahun 1984, pemikiran-pemikiran tentang merumuskan tujuan pembelajaran sudah dipengaruhi oleh pandangan Benjamin Samuel Bloom (atau yang biasa dipanggil Bloom), yaitu seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yang telah kontribusi besar terhadap penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas atau *mastery learning* (Bloom, 1956). Cukup kentara jika

paham “*Bloom minded*” inipun juga sudah diamanatkan dalam konstitusi bidang pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Pendidikan Nasional 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, bahwa kompetensi lulusan pendidikan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Utamanya di kalangan perguruan tinggi dan guru-guru yang pernah mengenyam pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan, tak asing lagi dengan taksonomi-nya Bloom atau *Bloom Taksonomy*, yang intinya membagi tujuan pendidikan ke dalam tiga *domain* (ranah, kawasan) yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). Agak berbeda dengan pembelajaran yang berorientasi tujuan (*goal*) yang diadopsi dari *Tyler* pada zaman PPSI (Pola Pengembangan Sistem Instruksional) pada Kurikulum 1975, maka sejak kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang disempurnakan), hingga KBK 1994, KBK 2004, dan Kurikulum 2013, sebenarnya orientasi pembelajaran di sekolah hanya membolak-balik pada tiga ranah tujuan instruksional yang diperkenalkan bloom tersebut. Meskipun tidak dieksplisitkan dengan kongkrit, pada masa KBK 1994, terlihat bahwa muara tujuan pembelajaran diutamakan dari kognitif → afektif → Psikomotor; pada KBK 2004 (yang tertunda karena pemberlakuan KTSP), muara tujuan pembelajaran diutamakan dari psikomotor → kognitif → afektif; lalu di Kurikulum 2013, muara tujuan pembelajaran diutamakan dari afektif → Psikomotor → Kognitif.

Memperhatikan perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia, sesungguhnya kita dapat melihat bahwa pendidikan sekolah di Indonesia sesungguhnya telah melewati tiga zaman kurikulum, yaitu (1) kurikulum yang berorientasi tujuan (1975-1984); (2) kurikulum berbasis *life-skill* (1994-2004-2006), dan (3) kurikulum berbasis karakter (2013). Lalu muncul pertanyaan, “Kurikulum KTSP 2006 berorientasi atau berbasis apa?” Mungkin ada yang spontan menjawab, “KTSP adalah kurikulum berbasis budaya”. Jawaban ini memunculkan pertanyaan baru lagi, “Apakah basis budaya dalam KTSP memiliki tujuan kompetensi belajar?” Jawabannya “ia” dan ada yang menyatakan “ragu-ragu”. Sepertinya inilah yang menjadi alasan bagi para penggugat KTSP, makanya kurikulum harus dikembalikan ke KBK. Sebab, kalau sebagian mata pelajaran (sebagai contoh pada mata pelajaran seni budaya) dalam KTSP tidak bisa diuraikan kompetensinya secara eksplisit, melainkan mempersoalkan seni dan budaya dalam konteks *scope* geografis, maka pembelajaran seni budaya dalam KTSP tidak memenuhi syarat sebagai pembelajaran bidang studi. Sebab yang dikatakan dengan pembelajaran bidang studi adalah pembelajaran yang melahirkan kemampuan pada bidang tertentu, misalnya kompeten secara pengetahuan, sikap, dan keterampilan tadi. Seandainya ada pokok bahasan “Musik Daerah Setempat, Musik Nusantara, atau Musik Mancanegara”, apa item kompetensi yang akan dicapai sebagai tujuan pembelajaran yang kawasan kompetensinya di daerah setempat, nusantara dan mancanegara?. Jawabnya, jelas kompetensinya mengambang. Sebab menjadi kabur skiranya ruang lingkup daerah secara geografis dijadikan ukuran kompetensi dalam mata pelajaran.

Selain daripada itu, alasan kurikulum KTSP mesti diganti menurut pemerintah, merupakan respon terhadap pemahaman esensi kurikulum yang tidak tepat. Jika arti kurikulum secara sempit adalah “*subject matter*” atau bidang tertentu yang diajarkan dan dipelajari dengan keahlian dan kompetensi tertentu, maka KTSP yang mengusung konsep pembelajaran di tingkat satuan pendidikan (menyesuaikan kompetensi yang dicapai dengan situasi dan kondisi daerah di daerah mana pembelajaran itu dilaksanakan), justru tidak menghasilkan kompetensi yang standar atau mengambang di setiap daerah. Dengan kata lain, KTSP dianggap sebagai kurikulum yang tidak logis karena sekolah diberi kebebasan untuk mengelaborasi kurikulum inti yang dibuat pemerintah, tetapi evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk mengevaluasi hasil belajar yang dominan menentukan kelulusan siswa malah dilakukan secara nasional melalui ujian nasional (UN). Hal lain yang menjadi alasan penggantian KTSP ke Kurikulum 2013 adalah kelemahan KTSP sebagai kurikulum yang tidak proporsional. Meskipun dalam kurikulum sudah dinyatakan pembagian kewenangan antara pemerintah dan sekolah, nyatanya distribusi tugas pengembangan kurikulum antara pemerintah dan sekolah sering tumpang tindih. Jika mengacu ke aturan di KTSP, pemerintah hanya menetapkan kerangka umum dari tujuan atau kompetensi, isi, strategi, dan evaluasi, sedangkan pengembangannya secara rinci menjadi siap pakai diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah yang diwakili dinas pendidikan kerap tidak melaksanakan peran

dan fungsinya untuk mengembangkan kurikulum karena keterbatasan sumber daya manusia. Lebih dari itu, seperti halnya sekolah tetap hanya melanjutkan *copy-paste* kurikulum yang sudah ada, tanpa perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah tersebut.

F. KURIKULUM 2013 BERBASIS KARAKTER, DENGAN MENGUTAMAKAN TUJUAN BELAJAR AFEKTIF

Salah satu konsep pemikiran yang membedakan antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum-kurikulum lainnya dalam sejarah pendidikan di Indonesia, adalah meletakkan *domain* tujuan belajar afektif lebih utama dari ranah tujuan belajar lainnya. Di samping itu, jika ranah tujuan afektif selama ini hanyalah sebagai pelengkap atau akses dari pencapaian kompetensi belajar pada ranah kognitif dan afektif, maka pada Kurikulum 2013, ranah tujuan belajar afektif mesti dinyatakan sebagai suatu kompetensi tujuan belajar yang kongkrit. Itulah sebabnya dalam Kompetensi Inti (KI) dari setiap bahasan dalam mata pelajaran di Kurikulum 2013, perlu mencatumkan dengan detail kompetensi afektif apa saja yang diperlukan dalam ranah sikap, sehingga tidak salah jika kompetensi afektif dalam KI dimaksud menjadi landasan untuk pembentukan karakter. Bagi sebagian guru, yang membina mata pelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai secara kongkrit seperti Pendidikan Agama dan PPkn misalnya, masalah mengkongkritkan ranah tujuan belajar pada bidang sikap dalam KI tidak begitu dipersoalkan, karena hanya memperkuat domain karakter tadi, di samping domain afektif dan kognitif. Namun bagi sebagai guru yang lain, khususnya untuk mata pelajaran yang selama ini dominan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, menetapkan tujuan belajar bidang afektif bukanlah pekerjaan mudah. Meskipun pemerintah telah memberikan landasan penetapan KI berkarakter pada silabus mata pelajaran yang berlaku secara nasional, tetap saja RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang dibuat guru butuh pertimbangan lebih dalam dalam menggunakan KI yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Dengan kata lain, jika RPP nantinya adalah satu-satunya kertas kerja kurikulum yang dapat dibuat dan dilaksanakan guru dalam kegiatan pembelajarannya, maka ada kemungkinan guru akan menyesuaikan KI berkarakter sesuai dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang dihadapinya.

G. PEMBELAJARAN BERMAKNA DENGAN KURIKULUM 2013

Adanya basis karakter dalam Kurikulum 2013, selama ini hanya ditinjau dari pencapaian kompetensi afektif yang ada pada tujuan belajarnya di setiap mata pelajaran. Padahal kalau ditelusuri lebih jauh, “Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan basis karakter dalam Kurikulum 2013?”, maka jawabannya menurut pemakalah bukan sekedar mempersoalkan kompetensi tujuan belajar karakter yang akan diperoleh siswa setelah belajar. Melainkan lebih dari itu, berbasis karakter di sini bukan sekedar pada konteks tujuan belajar, melainkan juga pada bagaimana cara pembelajaran di setiap mata pelajaran juga dilaksanakan secara berkarakter. Dengan demikian, cara mengajar guru dan cara belajar siswa juga harus berkarakter. Jadi dalam pembelajaran di kelas, sebelum tujuan belajarnya berkarakter, maka cara yang digunakan dalam proses pembelajaran juga harus berkarakter. Pengertian karakter di sini adalah memiliki ciri, sehingga dapat membedakannya dengan kurikulum yang lain.

Saat kurikulum 2013 disosialisasikan oleh pemerintah sebagai kurikulum yang berbasis karakter, maka ada tiga prinsip yang ingin diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sebagai suatu cara yang menjadi karakteristik di Kurikulum 2013, yaitu melaksanakan pembelajaran yang menyederhanakan (*simple instruction*), melaksanakan pembelajarannya yang terintegrasi (*Integrated instruction*), dan pembelajaran yang bermakna (*meaningfull instruction*). Jika ketiga prinsip itu diturunkan ke komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran, maka di pelajaran apapun yang dipelajari di sekolah, guru harus mampu memenuhi ketiga prinsip pembelajaran yang lebih sederhana, menerapkan kesatuan, dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa untuk komponen: (1) menetapkan tujuan belajar; (2) menyusun materi pelajaran; (3) pemilihan dan penggunaan metode; (4) pemanfaatan media dan sumber belajar; dan (5) melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran.

Meskipun ketiga prinsip pembelajaran di kurikulum 2013 ini sudah menjadi perbincangan yang populer di mata guru-guru dan pendidik, sebenarnya masalah kerap kali muncul dalam mengembangkan prinsip tematik-terintegrasi dalam mengintegrasikan materi pelajaran. Dalam hasil sosialisasi Kurikulum

2013 yang dipublikasikan sendiri oleh pemerintah, ada sedikit kelemahan di beberapa mata pelajaran yang sulit menerapkan tematik-terintegrasi ini karena: (1) konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia siswa. Akibatnya siswa sulit menyerap atau menemukan sendiri hal-hal yang bermakna tematik dalam pelajaran yang ia pelajari; (2) tujuan pembelajaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sehingga memasukkan tematik dalam kontek yang lebih luas juga lebih sulit. Hal ini semakin rumit karena guru selaku pendidik yang memberikan materi pelajaran kepada siswa terkadang belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (3) kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; karena beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; (4) Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; dan (5) Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.

F. KESIMPULAN

Apa boleh buat, bahwa kondisi rilnya saat ini adalah Kurikulum 2013 telah “ketok palu” dan harus dilaksanakan terutamanya oleh guru sebagai pemangku tugas pelaksanaan pembelajaran di kelas. Apapun gonjang-ganjing yang selama ini melatarbelakangi semua persepsi dan interpretasi kita tentang Kurikulum 2013, ada baiknya untuk sementara dikesampingkan, mengingat tugas pendidikan dalam bentuk menggerakkan roda pembelajaran jauh lebih penting dan sudah ada di depan mata. Yang penting diperbaharui oleh guru saat ini adalah niat mereka untuk melaksanakan Kurikulum 2013 dengan semestinya, termasuk tidak menaruh curiga yang tidak berasalasan, demi menyelamatkan pendidikan nasional dengan pekerjaan ruma bidang pembelajaran yang masih terbengkalai.

Lebih dari itu, pelaksanaan Kurikulum 2013 yang berbasis karakter, janganlah terlalu dieksploitasi kekurangannya, melainkan dicoba untuk memunculkan kelebihanannya. Karena bagaimanapun juga, Kurikulum 2013 sudah jauh berbeda pemaknaannya dengan KTSP, khususnya dengan niat baik untuk melaksanakan pendidikan berbasis karakter kepada siswa. Cara pandang kita terhadap basis karakter ini jangan hanya berkisar pada reposisi ranah tujuan belajar Bloom, dari yang dulunya mengutamakan kompetensi kognitif → Afektif → Psikomotor, menjadi Afektif → Psikomotor → Kognitif, melainkan pemaknaan karakter juga dalam kontek cara mengajar guru dan cara belajar siswa. Adapun pembelajaran yang menyederhanakan, terintegrasi dan bermakna juga dapat dimaknai sebagai pembelajaran berkarakter dalam arti mengimplementasikan komponen-komponen pembelajara berupa materi, tujuan, metode, media, dan evaluasi.

SUMBER RUJUKAN:

Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Bloom, B. S. ed. et al. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, Cognitive Domain*. New York: David McKay.

Krathwohl, D. R. ed. et al. (1964), *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook II, Affective Domain*. New York: David McKay.

Atmi Dwi W, 2010, Membedah Kekuatan dan Kelemahan KTSP,

Barry Nur Setyanto, 2007, Mengapa KTSP Sulit Diterapkan Di Indonesia, Jakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

<http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id>